SIKAP POLITIK KEPALA DESA DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNMENT DI DESA TANDA RAJA KECAMATAN KIKIM TIMUR KABUPATEN LAHAT

Wulan Puji Lestari ¹, Izomiddin², Norma Juainah³

¹²³Ilmu Politik, FISIP Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Email: ulanpujilestari09@gmail.com.¹

ABSTRACT

This Article discusses about The Performance Of The Headman in Realizing Good Government in the Village Of Tanda Raja, East Kikim District, Lahat Regenncy. This study uses qualitative research methods, the data obtained through direct interviews with several informants in the village of Tanda Raja. This study aims to determine the attitude of the village head in realizing good government in the village of Tanda Raja and to find out what are the inhibiting factors of the headman and the community in realizing good government. This study uses the theory of political behavior by Harold D. Lasswell, which theory is closely related to the political behavior of headsman. The results of this study are that the political behavior of the headman through his conversations perceptions, attitudes, is inseparable from the vision, mission and program aspects. So that it can be accordance with the duties and obligations. The second is the inhibiting factor in realizing good government, namely human resources that are still lacking, lack of village office facilities, and internet networks that are not yet possible.

Keywords: Political behavior, Democracy, Good Government.

ABSTRAK

Artikel ini membahas Sikap Politik Kepala Desa dalam Mewujudkan *Good Government* di Desa Tanda Raja Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, data diperoleh melalui wawancara langsung dengan beberapa informan di Desa Tanda Raja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sikap kepala desa dalam mewujudkan *good government* di Desa Tanda Raja dan untuk mengetahui apa saja faktor penghambat kepala desa serta masyarakatnya dalam mewujudkan *good government*. Penelitian ini menggunakan teori sikap politik oleh Harold D. Lasswel, yang mana teori ini sangat berhubungan dengan sikap politik kepala desa. Hasil penelitian ini pertama Sikap politik kepala desa lewat pembicaraan, persepsi, sikapnya tak terlepas dari segi visi misi dan program sehingga dapat disimpulkan bahwa sikap kepala desa diterapkan sesuai dengan tugas dan kewajiban

yang harus tetap menerima kecenderungan yang disampaikan oleh masyarakat dan menjadikan hal tersebut sebagai bagian dari proses menjalankan tugas dan kewajiban. Kedua, yang menjadi faktor penghambat dalam mewujudkan *good government* yaitu sumber daya manusia yang masih kurang, kurangnya fasilitas kantor desa, jaringan internet yang belum memungkinkan. Sikap politik selalu berorientasi pada nilai atau berusaha mencapai tujuan.

Kata Kunci: Sikap Politik, Demokrasi, Good Government.

PENDAHULUAN

Sikap politik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan individu maupun kelompok dalam proses politik. Menurut Ramlan Subakti 1992, mengatakan bahwa perilaku politik itu merupakan suatu kegiatan ataupun aktivitas yang berkenaan ataupun berhubungan langsung dengan proses politik, baik itu dalam pembuatan keputusan politik sampai kepada pelaksanaan aktivitas politik secara periode.

Sikap kepala desa dalam menata desa ada beberapa peran penting yang harus diperhatikan oleh seorang pemimpin diantaranya, pemimpin harus memiliki kemampuan intelektual yang tinggi terutama kecerdikan dalam menetapkan keputusan, melakukan perencanaan dan pengorganisasian yang matang dalam menjalankan program-program, dan memiliki keimanan yang kuat agar dalam memimpin selalu dalam naungan dan perlindungan Allah SWT.

Akan tetapi dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan masih banyak mengalami kendala karena telah diamati oleh peneliti melihat dari sudut pandang kinerja kepala desa yang belum optimal dan terkoordinasi dengan baik, diantaranya dapat dilihat dari berbagai keluhan-keluhan publik yang kemungkinan besar harus dievaluasi oleh pemerintah desa tanda raja.

Dimulai dari ketidakadilan yang disebabkan oleh kurangnya fungsi pemerataan kesejahteraan masyarakat untuk merealisasikan program pemerintah seperti program bantuan PKH (program keluarga harapan), BLT (bantuan langsung tunai), sehingga masih terdapat kalangan minoritas yang tidak mendapatkan sebagian bahkan secara keseluruhan dari program-program tersebut. Bukan hanya ketidakadilan namun kepala

desa tanda raja sebagai pemimpin masyarakat desa belum menunjukkan peran yang seharusnya, sehingga mayoritas masyarakat masih membutuhkan perhatian untuk menunjang berbagai kebutuhan.

Salah satu persoalan mendasar dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, baik di tingkat pusat, daerah, maupun desa merupakan cara membangun atau menciptakan mekanisme pemerintahan yang dapat mengemban misinya dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera secara keadilan. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat tersebut, pemerintah harus melaksanakan pembangunan berdasarkan aspirasi masyarakat, dan memberikan pelayanan publik dengan sebaikbaiknya. (Soemantri, 2010:65).

Berdasarkan uraian yang dijabarkan peneliti diatas, maka peneliti ingin mengetahui sejauh mana sikap kinerja kepala desa dalam memimpin masyarakatnya sehingga terbentuknya pemerintah desa yang baik. Sehingga peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul "Perilaku Politik Kepala Desa Dalam Mewujudkan *Good Government* Di Desa Tanda Raja Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat"

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan artikel ini, peneliti menggunakan metode yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data dan menganalisis data sesuai dengan permasalahan yang ada. Artikel ini berjudul Sikap Politik Kepala Desa dalam Mewujudkan *Good Government* di Desa Tanda Raja Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat, yang diteliti menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif deskriptif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti objek yang alamiah.

Pada penelitian kualitatif, peneliti menyajikan hasil penelitian secara deskriptif yaitu mendeskripsikan data yang dikumpulkan berupa data-data, gambar, dan bukan angka. Data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, video,

dokumen pribadi, arsip dan dokumen resmi lainnya (Moleong, 2010). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian lapangan. Menurut Moleong (2012), penelitian lapangan (*field research*) dapat dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif.

Sumber data yang dianalisis dalam artikel ini meliputi data primer dan sumber yang diajukan kepada tokoh masyarakat seperti: kepala desa, karang taruna, tokoh masyarakat, dan masyarakat setempat. Sumber data sekunder yaitu data tambahan atau penunjang yang telah dikumpulkan oleh peneliti untuk memperkuat penelitian. Yang menjadi sumber data sekunder ialah buku, UUD 1945, UU tentang desa, skripsi, jurnal, artikel, dan sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan analisis yang akan dilakukan oleh peneliti.

Tabel. 2 Data Informan

No	Nama	Keterangan
1	Saseb Birman	Kepala Desa
2	Markoni	Seksi Kesejahteraan
3	Suwarto	Seksetaris Desa
4	Zainal	Kepala Dusun 1
5	Bella Okta	Masyarakat Setempat
6	Suwarto	Masyarakat Setempat
7	Dewi	Masyarakat Setempat

Sumber: oleh penulis, 2022.

Data dari artikel ini ialah jawaban wawancara dari informan yang terlibat di dalam lingkungan kemasyarakat di Desa Tanda Raja Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat, dan juga dengan mengamati bagaimana kinerja kepemerintahan berjalan.

Dalam mengumpulkan data di dalam artikel ini peneliti menggunakan tiga teknik dalam pengumpulan data yaitu wawancara, dokumentasi dan observasi. Sehingga didalam wawancara peneliti tidak mendapatkan data maka peneliti bisa mendapatkan melalui dokumentasi dan observasi langsung dilapangan. Lokasi yang dipilih oleh peneliti ialah di Desa Tanda Raja Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat.

Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan data atau bentuk analisis yang dapat mengarahkan data yang penting sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi yang memudahkan dalam penarikan kesimpulan. Didalam reduksi data ini peneliti menghilangkan kata yang tidak relevan atau tidak sesuai. Contohnya: "hahaha, tertawa." Atau jawaban yang tidak penting diluar dari pertanyaan.

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun sehingga dapat memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Semua informasi yang didapat bisa dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah diraih. Didalam penyajian data peneliti sudah menyusun data yang relevan sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan. Proses yang peniliti lakukan dengan mengumpulkan data, membuat hubungan antar fenomena untuk menuju tercapainya analisis kualitatif yang valid.

Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi yaitu merupakan usaha untuk mencari atau untuk memahami makna/arti dari alur sebab dan akibat dalam berbagai informasi yang telah di dapat pada seorang peneliti. Didalam verifikasi peneliti masih tetap terbuka untuk menerima masukan data, walaupun data tersebut tergolong data yang tidak bermaksa. Tetapi ditahap ini peneliti memutuskan antara data yang mempunyai data dan data yang tidak diperlukan yang harus dipisahkan.

HASIL DAN DISKUSI

Pada bagian ini peneliti akan membahas bagaimana perilaku politik kepala desa dalam mewujudkan *good government* di Desa Tanda Raja Kecamatan Kikim Timur

Kabupaten Lahat, dengan menggunakan teori Sikap politik Harold D. Lasswell yang dikutip oleh S.P Varma, memberikan catatan penting mengenai perlaku politik yaitu: pertama, perilaku politik selalu berorientasi pada nilai atau berusaha mencapai tujuan. Nilai dan tujuan dibentuk dalam proses perilaku politik, yang sesungguhnya merupakan satu bagian. Kedua, Sikap politik bertujuan menjangkau masa depan, bersifat mengantisipasi, berhubungan dengan masa lampau dan senantiasa memperhatikan kejadian masa lalu.

A. Sikap Politik Kepala Desa dalam Mewujudkan Good Government di Desa Tanda Raja Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat

Kepala Desa merupakan pemegang peranan yang sangat strategis dalam organisasi pemerintahan desa. Keberhasilan suatu organisas di dalam menjalankan tugas-tugasnya sangat ditentukan kualitas dari pemimpinnya, sehingga kedudukan pemimpimpin sangat mendominasi setiap aktivitas yang dilakukan. Dalam konteks organisasi pemerintahan desa yang sangat peternalistik, dimana pegawai (bawahan) bekerja selalu tergantung pada pimpinan.

Pemberian motivasi yang berasal dari pimpinan ibarat satu instrument pemanas yang terkontrol secara termostatis sifatnya peka, kekuatan kepribadiannya justru dikontrol oleh pesan-pesan yang masuk ke dalam, yang memberikan informasi mengenai emosional, dalam bentuk peringatan kebutuhan, keinginan, harapan, ketidaksukaan anggota-anggota kelompoknya dan lain-lain.

Cara bersikap dan bertindak seorang pemimpin, memerlukan keterampilan dan seni tersendiri agar bawahan mau bekerja dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab. Untuk itu seorang pemimpin harus dapat menerjemahkan keinginan-keinginan dan perasaan-perasaan bawahan dalam melaksanakan kepemimpinan. Dengan kata lain, dibutuhkan seorang pemimpin yang manusiawi, bukan pemimpin yang memandang seorang pegawai sebagai mesin yang dapat digerakkan begitu saja.

Artinya salah satu hal yang menyebabkan seorang bawahan mau melaksanakan tugas-tugasnya dengan penuh kesadaran dan bertanggung jawab sehingga berpengaruh terhadap kinerja organisasi, adalah bagaimana cara seseorang pemimpin tersebut dalam menggerakkan dan mempengaruhi bawahannya agar mereka mau berpartisipasi dalam meningkatkan kinerja organisasi dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Menurut Harold D.Lasswell terdapat tiga dimensi yaitu visi, demokrasi dan kompetensi.

Terwujudnya suatu pemerintahan yang baik bukan hanya sikap kepala desa saja, tetapi juga tergatung bagaimana sikap semua pegawai kantor desa. Karena sikap ataupun perilaku pegawai desa dapat mempengaruhi kebaikan desa tersebut contohnya pelayanan terhadap masyarakat. Jika sikap dan perilaku pegawainya tidak baik, bagaimana bisa masyarakat mendukung kesejahteraan desanya.

Berdasarkan keseluruhan data yang penulis lakukan melalui wawancara serta observasi, maka pelayanan yang dilakukan di kantor Desa Tanda Raja secara umum harus memenuhi harapan-harapan pelanggan dan memuaskan kebutuhan mereka. Namun demikian, meskipun definisi ini berorientasi pada pengguna layanan, tidak berarti bahwa dalam menentukan kualitas pelayanan penyedia jasa pelayanan harus menuruti semua keinginan konsumen. Membandingkan persepsi pengguna layanan atas pelayanan yang diterima adalah cara mengetahui suatu kualitas. Pelayanan yang berkualitas dapat dinilai dari asas-asas pelayanan yang dilakukan oleh pegawai kantor desa yaitu:

- a. Kesederhanaan
- b. Kejelasan dan Kepastian
- c. Keamanan dan Kenyamanan
- d. Keterbukaan

Dengan demikian dilakukan penilaian tentang sama tidaknya antara harapan dengan kenyataan, apabila tidak sama maka pemerintah diharapkan dapat

mengoreksi keadaan agar lebih teliti untuk peningkatan kualitas pelayanan publik. Adapun dasar untuk menilai suatu kualitas pelayanan selalu berubah dan berbeda. Apa yang dianggap sebagai suatu pelayanan yang berkualitas saat ini tidak mustahil dianggap sesuatu yang dianggap tidak berkualitas pada saat yang lain. Maka kesepakatan terhadap kualitas sangat sulit untuk dicapai.

B. Faktor Penghambat dalam Mewujudkan Good Government

Penyelenggaraan pemerintah yang baik adalah pemerintah yang memberikan berbagai kemudahan, kepastian, dan bersih dalam menyediakan pelayanan kepada warga masyarakat dan melindungi dari berbagai tindakan sewenang-wenang terhadap diri, hak maupun harta benda masyarakat. Dalam wawancara dengan Bapak Saseb Birman selaku Kepala Desa Tanda Raja, menambahkan faktor kinerja pendukung dan faktor penghambat dalam mewujudkan *good government* di Desa Tanda Raja adalah sebagai berikut:

Faktor kinerja pendukung tak lepas dari sumber daya manusia, dimana sumber daya manusia yang ada di Desa Tanda Raja terkhusus aparat desa dari segi pendidikan sudah mumpuni dalam bidangnya masing-masing

Faktor pendukung yang lain dalam mewujudkan *good government* adalah pemerintahan desa itu sendiri khususnya pemerintah desa selaku pengelola anggaran dan pelaksana kegiatan harus benar-benar sesuai pada skala prioritas dalam pengelolaannya. Setidaknya ada tiga pilar pendukung dalam mewujudkan *good government* jika diaplikasikan dalam sistem pemerintahan yakni, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Selain faktor pendukung, faktor penghambat sering kali juga kita temui dalam mewujudkan *good government* didesa, terkhusus pada pemerintahan di Desa Tanda Raja faktor penghambat yang sering dialami yaitu sumber daya manusia (SDM) yang masih kurang, kurangnya fasilitas kantor desa, jaringan internet yang belum

memungkinkan, pembangunan desa yang harus dari hibah. Maka masih sulit bagi pemerintahan desa untuk mewujudkan *good government*.

Adapun sikap kepala desa dalam mewujudkan *good government* yang dibahas dalam penerlitian ini yaitu apabila pemerintahan bersinggungan dengan semua unsur karakteristik atau prinsip-prinsip *good government* yaitu: Partisipasi, kerangka/aturan hukum, transparansi, responsivitas, consensus dan keadilan.

KESIMPULAN

Sesuai dengan teori yang peneliti gunakan teori sikap politik yang dikemukakan oleh Harold D. Lasswell menjelaskan bahwa pertama, perilaku politik selalu berorientasi pada nilai atau berusaha mencapai tujuan. Nilai dan tujuan dibentuk dalam proses perilaku politik, yang sesungguhnya merupakan satu bagian. Kedua, perilaku politik bertujuan menjangkau masa depan, bersifat mengantisipasi, berhubungan dengan masa lampau dan senantiasa memperhatikan kejadian masa lalu. Dari teori inilah peneliti menelaah setiap perilaku dari cara memperatikan sikap, tingkah laku berupa pembicaraan, pernyataan, persepsinya dari hal-hal politik yang disampaikan oleh beberapa informan di Desa Tanda Raja tersebut.

Dalam hal ini perilaku politik kepala desa lewat pembicaraan, persepsi, sikapnya tak terlepas dari segi visi misi dan program, karena dari sanalah mereka melihat gambaran kinerja dalam memimpin desa. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh beberapa informan dapat disimpulkan bahwa sikap kepala desa diterapkan sesuai dengan tugas dan kewajiban yang harus dilakukan oleh kepala desa mengenai bagaimana harus tetap menerima kecenderungan yang disampaikan oleh masyarakat dan menjadikan hal tersebut bagian dari proses menjalankan tugas dan kewajiban sesuai dengan visi misi.

Faktor yang menjadi penghambat dalam mewujudkan *good government* didesa tanda raja, yaitu sumber daya manusia (SDM) yang masih kurang, kurangnya fasilitas kantor desa, jaringan internet yang belum memungkinkan, pembangunan desa yang

harus dari hibah. Maka masih sulit bagi pemerintahan desa untuk mewujudkan *good government*. Tetapi dengan demikian tidak megurangi kualitas pelayanan yang diberikan pemerintah desa terhadap masyarakatnya agar masyarakat merasa nyaman dan puas dalam urusan-urusan yang dilakukan dikantor desa. karena pelayanan yang ada sudah dikatakan cukup baik. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa pemerintahan desa akan tetap berusaha untuk mewujudkan suatu perubahan yang baik untuk menjadikan desa lebih berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung Setiawan. 2022. Skripsi Model Keputusan Politik Rezim Teknokrat di Indonesia (Studi pada Periode Presiden BJ Habibie). FISIP. Ilmu Politik. Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- Bambang Irawan. 2013. Studi Analisis Konsep E-Government: Sebuah Paradigma Baru dalam Pelayan Publik. Vol.2 No.1, April 2013.
- Furri Trisnawati, 2020. Peranan Inspektorat Daerah dalam Rangka Meningkatkan Good Government Penyelenggarakan Pemerintah Desa (Studi Kasus pada Desa Tertinggal di Kabupaten Blitar). Vol.9 No.2Tahun 2020.
- Gusti Ayu Agung Yustika Nanda dan Gusti Ayu Made Asri Dwija Putri. 2019. Good Government Governance, Gaya Kepemimpinan dan Kinerja Manajerial Penyelengaraan Pemerintahan Desa. Jurnal Akuntansi Vol.31 No.8
- Kun Budianto. 2019. Gaya Kepemimpinan Kepala Kantor Wilayah Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Meningkatkan Kualitas Kinerja Pegawai. Vol.19 No.2 Tahun 2019.
- Muhammad Awalil Resky S. *Skripsi Partisipasi Masyarakat Dalam meningkatkanGood Governance*. FISIP. Ilmu Pemerintahan. Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang.

- Wulan Puji Lestari, Izomiddin, Norma Juainah, Sikap Politik Kepala Desa Dalam Mewujudkan Good Government Di Desa Tanda Raja Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat, JSIPOL, Vol.2 Issue.3 No. 1, July 31, 2023
- Muhammad Ivan Saputra. 2020. Skripsi Perilaku Politik Masyarakat Pada pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus di Pekon Susuk Kecamatan Kelumbayan KabupatenTanggamus). Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, Pemikiran Politik Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Muhammad Malik Fajar. 2020. Skripsi Perilaku Politik Pengemudi Ojek Online Terhadap Capres dan Cawapres Pada Pilpres 2019 di Kota Palembang. FISIP. Ilmu Politik. Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- Mukhammad Aras Bin Mannek dan Samihah Khalil. 2013. *Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pelayanan Publik (Studi Kasus Kabupaten Indragiri Hilir Riau)*. Vol. XII No2 Th,2013.
- Nur Hazijah. 2020. Skripsi Thesis Peran Kepemimpinan Kepala Desa dalam Mewujudkan Good Governance (Studi Kasus Pergantian Kepala Desa Putatlor Kecamatan Manganti Kabupaten Gresik). FISIP. Ilmu Politik Departemen Politik. Universitas Airlangga.
- Safaudiyah Purwaningsih. 2009. Skripsi Perilaku Politik Warga Negara dalam Pemilihan Kepala Desa Untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance). Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret.
- Semi Serviko Salendu, Apri Randonuwu, Johny Lengkong. *Kepemimpinan Kepala Desa dalam Mewujudkan Good governance Desa Manembo Kec. Passi Timur Kab. Bolaang Mongondow.* Vol.2 No.3 Tahun 2022.
- Septio Widodo. 2019. Skripsi Peran Kepala Desa dalam Meningkatkan Partisipasi
 Politik Masyarakat Desa Kuang Dalam Barat Kecamatan Rambang Kuang
 Kabupaten Ogan Ilir Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019. FISIP,
 Ilmu Politik, UIN Raden Fatah Palembang.

- Wulan Puji Lestari, Izomiddin, Norma Juainah, Sikap Politik Kepala Desa Dalam Mewujudkan Good Government Di Desa Tanda Raja Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat, JSIPOL, Vol.2 Issue.3 No. 1, July 31, 2023
- Suandri, 2015. Perilaku Politik Pemilih Masyarakat Desa Nibung Kecamatan Selimbau Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2015. Jurnal Ilmu Politik Tahun 2018.
- Trisusanti Lamangida, Muh.Firyal Akbar, Hasna Hasan. 2017. *Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Membangun Desa Bandung Rejo Kecamatan Boliyohuto*. Jurnal Ilmu Administrasi. Volume 6 Nomor 1 Juni 2017.

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.